

RINGKASAN

Kasus korupsi tidak hanya berpusat di pemerintah pusat tetapi juga menyebar hingga ke pemerintah daerah. Kasus korupsi yang semakin banyak terjadi di pemerintah daerah menunjukkan bahwa implementasi pelaksanaan otonomi daerah berbanding terbalik antara harapan dan kenyataan yang terjadi. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat mental korupsi, kolusi dan nepotisme dalam urusan-urusan publik di ranah pemerintah daerah. Penelitian ini menggambarkan jumlah kasus korupsi, bentuk-bentuk kasus korupsi yang terjadi pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan karakteristik pelaku korupsi berdasarkan jenis kelamin dan kedudukan jabatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui website KPK yaitu data terkait publikasi penanganan perkara kasus korupsi tahap *inkracht* dari bulan Januari hingga Desember yang terbit setiap satu tahun sekali dan diunggah pada rentang waktu 2018 hingga 2020. Peneliti juga menggunakan data publikasi tren kasus korupsi pada website ICW yang terbit setiap satu tahun sekali dan diunggah pada rentang waktu 2018 hingga 2020.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki jumlah kasus korupsi paling banyak dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi. Adapun bentuk-bentuk kasus korupsi yang paling banyak terjadi pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu penyuapan, gratifikasi, kerugian keuangan negara dan pemerasan. Sebagian besar pelaku korupsi pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota didominasi oleh laki-laki. Berdasarkan kedudukan jabatan, Anggota DPRD Provinsi dan Pegawai Negeri Sipil Kabupaten/Kota menempati posisi teratas sebagai pelaku korupsi dengan jumlah paling banyak kemudian disusul oleh Anggota DPRD Kabupaten/Kota, bupati, Pegawai Negeri Sipil Provinsi, wali kota, hakim, gubernur, Ketua DPRD Kabupaten/Kota, sekretaris daerah kabupaten/kota, Wakil Ketua DPRD Kabupaten/Kota, sekretaris daerah provinsi serta wakil bupati. Rekomendasi yang dapat Penulis berikan terkait korupsi yang terjadi pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota yaitu perlu memperbaiki sistem birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien, mengimplementasikan etika profesi dengan sebaik-baiknya, memberikan sanksi hukum dan sosial yang tegas serta perlu dilakukan kerjasama yang saling terintegrasi antara pemerintah, lembaga penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat dalam rangka memerangi korupsi.

SUMMARY

Corruption cases not only happened in the central government but it also spreaded to the local government. The increasing case of corruption that happened in the local government showing that the implementation of regional autonomy have the opposite part from expectation and the reality. It shows that there's still corruption, collusion and nepotism mentality in the local affairs of local government. This research describing the number of corruption cases, type of corruption cases that happened in province government and city government also the characteristic of corruption perpetrator by their sex and position in the government.

The research method that has been used for this research is secondary data analysis. The data for this research that got obtained from KPK website contain a data about publication of corruption case's handling inkracht step from Januari until December that got published once a year and posted from 2018 to 2020. The researcher also using publication data about corruption cases trend on the website ICW and got published once a year and posted within the span of 2018 to 2020.

The result of this research showing that the corruption cases mostly happened in regency/city government and having the most number on corruption's table than province government. As for the type of corruption that mostly happened in the regency/city and province government is bribery, gratification, financial loss country and extortion. Most of the corruption perpetrator in regency/city government and province government dominated by men. Based on position as the corruption perpetrator are members of provincial parliament and city government employees sitting as the number one of corruption perpetrator with the most cases then followed by the members of city council, regents, provincial employees, mayors, judges, governor, the city council speaker, city secretary, the deputy of city council speaker, regional secretary and the regent deputy. Recommendations that the author can give related to corruption that occurs in the province government and regency/city government are the need to improve the bureaucratic system to be more effective and efficient, implement professional ethics as well as possible, and provide strict legal and social sanctions and need to do integrated cooperation between the government, law enforcement agencies and all levels of society in the context of fighting corruption.